

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan komponen vital dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Desa memiliki peran sentral dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang umumnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan infrastruktur. Pembangunan desa tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi perdesaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat percepatan ekonomi secara nasional. (Arfianto & Balahmar, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai salah satu upaya strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. BUMDes hadir sebagai instrumen bagi desa untuk mengelola potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam bentuk usaha yang produktif. Pemerintah berharap melalui BUMDes, desa dapat lebih mandiri secara ekonomi, tidak hanya

bergantung pada alokasi Dana Desa, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan desa.

Pendirian BUMDes didasarkan pada beberapa regulasi penting diantaranya, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan BUMDes sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang lebih rinci menjelaskan mengenai tata Kelola BUMDes dan fungsinya dalam pengelolaan aset desa dan pengembangan ekonomi desa, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang memberikan panduan teknis mengenai pembentukan, pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

Secara umum, tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, BUMDes berperan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Hal ini turut menciptakan produk-produk unggulan desa yang dapat dipasarkan lebih luas, baik di pasar lokal maupun nasional. (Putri, 2017). BUMDes menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui keuntungan dari usaha-usaha yang dijalankan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. (Purwanto, 2020). Salah satu tujuan BUMDes adalah untuk memperkuat kemandirian desa dari sisi ekonomi. Dengan adanya BUMDes, desa tidak lagi

terlalu bergantung pada bantuan pemerintah, karena sudah mampu mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada secara mandiri. (Kusnadi, 2017).

Peran BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program-program BUMDes yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan warga, dan memberikan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Haryanto, 2021).

BUMDes Niaga Bahari Putra didirikan pada tanggal 1 Januari 2018 di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, melalui Peraturan Desa Sindangkerta Nomor 5 Tahun 2018. Pendirian BUMDes ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian desa dalam aspek ekonomi. Sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat, BUMDes Niaga Bahari Putra diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian lokal, dengan memanfaatkan potensi-potensi desa yang belum tergarap secara optimal.

Pembentukan BUMDes ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan desa untuk mengembangkan badan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Peraturan Desa, BUMDes ini memiliki struktur organisasi, visi, misi, dan rencana usaha yang diharapkan mampu mendongkrak kondisi ekonomi desa melalui berbagai unit usaha.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Niaga Bahari Putra memiliki beberapa bidang usaha yang direncanakan

untuk dijalankan oleh BUMDes ini. Bidang-bidang usaha tersebut meliputi, unit usaha produksi (pengolahan produk lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan), unit pariwisata dan olahraga (pengembangan sektor pariwisata lokal dan penyediaan sarana olahraga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat), unit usaha jasa (penyediaan berbagai layanan jasa, seperti layanan internet, transportasi lokal, dan penyediaan fasilitas umum), unit usaha perdagangan (penyediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat melalui toko atau minimarket desa), unit usaha pertanian, perikanan dan Perkebunan.

Tujuan utama dari pengembangan bidang-bidang usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan secara keseluruhan mendukung kemandirian ekonomi desa melalui usaha-usaha yang relevan dengan potensi lokal yang ada. Meskipun memiliki rencana usaha yang ambisius seperti yang tercantum dalam AD/ART, kondisi aktual BUMDes Niaga Bahari Putra menunjukkan bahwa implementasi program-program tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil pra penelitian, hanya satu bidang usaha yang benar-benar berjalan hingga saat ini, yaitu pelayanan internet melalui penyediaan *Wi-Fi* bagi masyarakat.

Selain itu, masalah modal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi BUMDes dalam mengembangkan usaha-usaha lainnya. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan dan kesenjangan antara perencanaan dan realitas di lapangan. Ada beberapa kendala internal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes Niaga Bahari Putra, antara lain kapasitas SDM yang rendah, manajemen yang kurang terstruktur dan keterbatasan

modal. Di luar masalah internal, terdapat juga beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh BUMDes Niaga Bahari Putra seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, persaingan ekonomi lokal dan regulasi yang tidak sinkron.

Melihat kondisi BUMDes Niaga Bahari Putra yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakannya, urgensi dilakukannya evaluasi kebijakan menjadi sangat penting. Evaluasi kebijakan merupakan proses penting dalam siklus kebijaksanaan publik, terutama bagi organisasi seperti BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya desa secara mandiri. BUMDes berfungsi sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan publik sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengukur apakah kebijakan yang ada memang telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat dilihat dari dua indikator utama, yaitu perekonomian masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang meneliti terkait Evaluasi Pengelolaan BUMDes. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, dan Yeti Lis Purnamadewi dengan judul penelitian “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan

Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes Harapan Jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ike Putri Wulansari dan Wahyu Nurharjadmo dengan judul penelitian “Evaluasi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendang Pinilih di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya sesuai. Pada tahap pengorganisasiannya tidak semua unit usaha yang tertulis dalam aturan diimplementasikan. Selain itu, pada tahap pengintegrasian masih ditemui pengelola dan anggota yang merangkap tugas dan tidak sesuai antara AD/ART dengan Surat Keputusan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurmila, Petronela Sahetapy dan Iriane. S. Ponto dengan judul penelitian “Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes begitupun dalam mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BUMDes.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan BUMDes yang tertuang dalam AD/ART terkait kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Desa Sindangkerta. Penelitian ini mengisi *GAP* penelitian terdahulu dengan fokus pada evaluasi kebijakan BUMDes Niaga Bahari Putra menggunakan model evaluasi

CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang belum banyak diterapkan dalam konteks evaluasi kebijakan BUMDes. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan BUMDes yang tercantum dalam AD/ART dengan implementasi realitanya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator ekonomi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi kebijakan BUMDes secara lebih mendalam dan berbasis pada model evaluasi kebijakan yang komprehensif. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sindangkerta Kabupaten Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes Niaga Bahari Putra terhadap program-program yang dijalankan?
2. Bagaimana dampak program-program yang dijalankan oleh BUMDes Niaga Bahari Putra terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangkerta dari aspek ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan BUMDes Niaga Bahari Putra yang tercantum dalam AD/ART dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi serta pelaksanaan program di lapangan.
2. Untuk mengidentifikasi dampak program-program BUMDes Niaga Bahari Putra terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkerta, khususnya dari segi peningkatan ekonomi dan partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pemahaman terkait evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan BUMDes, serta penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hal ini memperkaya wawasan penulis dalam penelitian kebijakan dan dampak program serta dapat menjadi kontribusi dalam literatur akademik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan BUMDes.

b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niaga Bahari Putra

Hasil penelitian ini membantu BUMDes dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang tercantum dalam AD/ART telah diimplementasikan secara efektif. Identifikasi masalah dan ketidaksesuaian dapat menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan. BUMDes dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam merancang strategi

pengembangan usaha baru atau memperbaiki usaha yang sudah ada agar lebih berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Pihak Lain

1) Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengawasi dan membina BUMDes agar lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa dapat memperbaiki perencanaan kebijakan pembangunan desa berbasis ekonomi lokal dengan hasil penelitian ini.

2) Masyarakat Desa Sindangkerta

Masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari rekomendasi penelitian ini dalam bentuk keterlibatan yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha BUMDes yang lebih baik.

3) Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam kajian kebijakan publik, pengelolaan BUMDes, dan pembangunan ekonomi desa. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk studi lebih lanjut.